

# Resistensi Mahasiswa terhadap Kebijakan Kampus di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Suliadi

Alumnus Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat email: [zulley\\_nusantara@yahoo.co.id](mailto:zulley_nusantara@yahoo.co.id)

## Abstract

The student resistance to the authority is a history that cannot be separated from the long journey of each country. Student involvement in the process of changes for their nation in every movement of history cannot be denied. Students as intellectual get a job to be responsible for the social and economic situation of the political nation.

History has many notes that the changes in social systems, economics, and politics in many countries are the outcome of the intellectuals that was pioneered by the students. Role of students in Indonesia is not a stranger within each change. The achievement of the independence of Indonesia cannot be separated from the role of students who at the time as one of the component of who participated inside.

Various resistances of students against the college policy has always colored the dynamics of college life, this is what later became the base of growing various movement organizations in Yogyakarta, even in the progress up to now only UIN, which still survive dialectical process of the student movement. That is the background theme of this research.

The research was done at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. This study uses Michel Foucault's theory of power relations and knowledge, as well as his theory of resistances JC scott. The method used is a descriptive of qualitative, while the techniques of data collection be done in several ways, namely direct observation (direct observation), participation (direct participation), interview (interview), and document analysis. Techniques of data analysis is started by studying all of the data acquired, reducing the data by creating an abstraction, coding (categorizing data), reconstruction (rearrangements), and finally to do the interpretation of the obtained data.

The results of this study indicate that the resistances of students at UIN Sunan Kalijaga formed the background by two factors, objective and subjective factors. Objectively factor is the situation of national education that has capitalised and also has affected to the dynamics life in the UIN Sunan Kalijaga. More subjective factors refers to the awareness of students about the role of their social position as a student, as the agents of change and agents of control. A blend of value awareness with objective facts that are inconsistent with expectation later gave birth to resistance. Resistance becomes the biological child of a student combination awareness of the objective situation in education.

Meanwhile, a form of resistance has performed by students existing two kinds, in an organized and individually. The organized forms such as: long march action, rector occupation, free speech, as well as publishing leaflets. Whereas resistance is performed by an individual for example: through the articles sent to mass media, mass media both in the form of a daily newspaper and news media students in the internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Keywords:** Resistance, Students, Campus

*".....Kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan, ataukah alat penindasan?.....".<sup>1</sup>*

## Pendahuluan

Resistensi mahasiswa terhadap kekuasaan merupakan sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari proses perjalanan panjang setiap negara. Keterlibatan mahasiswa dalam proses perubahan dari setiap gerak sejarah bangsanya merupakan sebuah fakta sejarah yang selalu tertulis pada jamannya. Mahasiswa sebagai kaum intelektual mendapatkan tugas untuk selalu bertanggung jawab atas situasi sosial, ekonomi dan politik bangsanya.

Secara sosiologis, mahasiswa merupakan sekelompok yang diuntungkan oleh situasi sosial pada jamannya, karena hanya mahasiswa<sup>2</sup> yang mempunyai kesempatan dan banyak waktu untuk mempelajari setiap perkembangan situasi masyarakatnya. Mohtar Mas'ud menjelaskan bahwa

mahasiswa merupakan makhluk yang istimewa. Secara biologis istimewa, karena mereka berada pada lapisan umur yang memungkinkan untuk menjadi *energetic* dan cocok untuk menjadi pelopor perubahan keadaan (Mohtar Mas'ud, 2003: 184).

Seorang Indonesianis Benedict RO'G Anderson (1972) menjelaskan, bahwa yang menjadi inti kekuatan dari revolusi Indonesia untuk merebut kemerdekaan berada di tangan pemuda. Sejak tahun 1900-an, kaum muda terpelajar telah menunjukkan kiprahnya dalam perjuangan nasional. Peristiwa penting yang menandai kiprah perlawanan kaum muda terpelajar adalah dengan berdirinya Budi Utomo pada bulan Mei 1908. Budi Utomo dibentuk dalam sebuah pertemuan yang dihadiri para mahasiswa dari STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Ambtenaren, Sekolah ketrampilan Untuk Dokter Pribumi*)<sup>3</sup>. Sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan, maka status mahasiswa semakin terpandang di mata masyarakat secara umum (Arbi Sanit, 1982: 106).

<sup>1</sup> Dikutip dari potongan bait puisi W.S RENDRA yang berjudul "*Sajak Pertemuan Mahasiswa*", sajak ini dipersembahkan pada mahasiswa Universitas Indonesia di Jakarta, serta di bacakan dalam salah satu adegan film "Yang Muda Yang Bercinta", yang disutradarai oleh Sumandjaja.

<sup>2</sup> Mahasiswa dalam konteks ini sebagai generasi muda (pelajar) yang mampu mengenyam dunia pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

<sup>3</sup> Lahirnya Budi Utomo dan organisasi Gerakan Pemuda Terpelajar saat itu tidak lepas sebagai hasil dari politik etis pemerintahan kolonial Belanda. Politik etis atau sering disebut politik balas budi meliputi, edukasi, imigrasi dan irigasi. Kebijakan ini juga mendorong berdirinya beberapa sekolah di Hindia Belanda, seperti Sekolah Tinggi Teknik di Bandung, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, Fakultas Kedokteran (STOVIA), Sekolah Istri (Keutamaan Istri), Taman Siswa, dan Sekolah SI di Semarang. Selanjutnya, mengenai organisasi Budi Utomo dapat dilihat di Buku "*Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*" karya Susanto Tirtoprodjo, tentu selain karya buku ini ada banyak buku sejarah yang lain tentang BO.

Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong bagi meningkatnya peranan mahasiswa dalam setiap perubahan sistem sosial politik Indonesia. *Pertama*, mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai horizon yang luas diantara lapisan masyarakat yang ada. *Kedua*, mahasiswa merupakan kelompok masyarakat paling lama bersosialisasi dengan lembaga pendidikan, sehingga sampai di Universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi terpanjang dibandingkan dengan masyarakat yang lain. *Ketiga*, kehidupan kampus yang turut membentuk gaya hidup mahasiswa. Keanekaragaman yang ada di kampus semakin mewarnai terhadap gaya hidup mahasiswa dalam perguruan tinggi. *Keempat*, mahasiswa dengan mendapat pendidikan yang lebih baik, merupakan elite yang ada di angkatan muda. *Kelima*, besarnya peranan mahasiswa dalam perkembangan juga turut dipengaruhi oleh perubahan orientasi universitas (Arbi Sanit, 1982: 109-110). Sejarah runtuhnya rezim Orde Baru yang melahirkan Orde reformasi pada tahun 1998 merupakan wujud dan akumulasi dari resistensi-resistensi mahasiswa bersama rakyat Indonesia.

Kebebasan berorganisasi, berekspresi, serta berpendapat sebagai dampak positif di bukanya ruang demokrasi pascareformasi, dan ini menjadi angin segar bagi mahasiswa dan rakyat Indonesia. Angin segar ini kemudian segera diikuti dengan kehadiran organisasi-organisasi yang berbasis di internal kampus, seperti LMND (Liga Mahasiswa Nasional Demokratik), FMN (Front Mahasiswa Nasional), SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia), PEMBE-BASAN (Pusat Perjuangan Mahasiswa Pembebasan Nasional).

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>4</sup> merupakan salah satu universitas negeri yang ada di Yogyakarta dengan beragam dinamikanya, yang selalu diwarnai dengan aksi-aksi perlawanan oleh mahasiswanya, baik perlawanan terhadap kebijakan internal kampus maupun aksi-aksi untuk merespon kebijakan yang dikeluarkan negara. Pada awal konsolidasi gerakan mahasiswa di Yogyakarta tahun 1990-an, UIN Su-Ka menjadi salah satu kampus yang turut andil dalam proses penyebaran gagasan-gagasan kritis, khususnya melalui media pers mahasiswa. Isu yang diangkatnya pun beragam, mulai dari isu mahal biaya pendidikan, hingga tuntutan mengenai hak-hak normatif mahasiswa.

UIN Su-Ka juga merupakan kampus yang menjadi basis dari tumbuhnya beragam organisasi gerakan di Yogyakarta dengan berbagai macam aliran ideologinya, bahkan dalam perkembangannya hingga sekarang<sup>5</sup> hanya UIN yang masih tetap bertahan pada proses dialektika gerakan mahasiswanya jika dibandingkan dengan kampus-kampus lain yang ada di Yogyakarta, seperti: SMI, SEKBER, FMN, PMII, HMI MPO, HMI DPO, KAMMI, IMM, FORSMAD, KMPD dan GMNI. Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Mengapa mahasiswa melakukan resistensi terhadap UIN Su-Ka? Bagaimana bentuk resistensi yang dilakukan mahasiswa di UIN Su-Ka?*

## Kerangka Teori

Berbagai perlawanan yang dilakukan mahasiswa, baik dalam bentuk organisasi maupun individu terhadap kebijakan kampusnya bukanlah realitas yang berdiri

<sup>4</sup> Sejarah berdirinya UIN Sunan Kalijaga selanjutnya akan dijabarkan dalam BAB II dari penelitian ini.

<sup>5</sup> Maksudnya di sini dalam konteks hingga penelitian ini akan dilakukan, yaitu 2006 hingga tahun 2011.

tunggal tanpa adanya penyebab. Oleh karena itu, untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan kerangka teori Michel Foucault tentang relasi kuasa dan pengetahuan sebagai kerangka untuk menelusuri penyebab adanya resistensi mahasiswa. Adapun mengenai pengertian resistensi, penulis mengutip dari tokoh James C. Scott yang dikontekstualisasikan dengan resistensi mahasiswa sebagai kerangka untuk melihat bentuk-bentuk resistensi mahasiswa.

### 1. Relasi Kuasa dan Pengetahuan

Kuasa dan pengetahuan mempunyai hubungan yang saling menguntungkan diantara keduanya. Tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan, begitu juga sebaliknya, tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan. Dengan pengetahuan, maka kekuasaan akan beroperasi (Konrad Kebung, 2002: 33).

Kekuasaan merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti terhadap apa yang di inginkan oleh pihak penguasa. Dalam bahasa Michel Foucault, kekuasaan adalah upaya untuk mendisiplinkan individu-individu melalui norma-norma yang ditentukan oleh penguasa. Melalui mekanisme disiplin dan norma, maka individu menjadi patuh terhadap kekuasaan (Haryatmoko, 2002: 14 ).

Dalam bukunya *Surveiller et Punir*, dijelaskan bahwa kekuasaan yang menormalisasi tidak hanya di jalankan dalam penjara, tetapi juga beroperasi melalui mekanisme-mekanisme kontrol sosial yang dibangun untuk menjamin kesehatan, pengetahuan dan kesejahteraan. (Foucault, 1975: 358-359). Dengan demikian, lembaga pendidikan formal (dalam konteks ini kampus), juga menjadi bagian dari sistem

sosial yang terlibat dalam pembentukan disiplin terhadap individu-individu. Di samping itu, lembaga pendidikan (baca: kampus) yang idealnya menjadi ajang pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran mahasiswa menjadi makhluk sosial dan politik juga seringkali menjadi mesin penguasa untuk menanamkan ideologi para penguasa, sehingga kursi kekuasaannya tidak terganggu.

Namun demikian, kekuasaan dengan beragam mekanismenya tidak selalu melahirkan kepatuhan dan ketaatan dari subordinatnya, karena kekuasaan yang seperti dijelaskan oleh Foucault merupakan kekuasaan yang miskin imajinasi, monotone dan kurang inovatif (Donny Gahral Adian, 2001: 46). Dalam analisisnya, Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan bukan melahirkan kepatuhan, melainkan justru melahirkan resistensi. Tidak ada kuasa yang bebas dari oposisi, di mana ada kuasa disitu lah resistensi akan lahir. Dalam bukunya *The Will of Knowledge*, Foucault memberikan contoh bagaimana kekuasaan untuk melarang itu justru melahirkan resistensi. Foucault menjelaskan, di saat adanya kontrol sosial lewat wacana psikiatri terhadap perilaku homoseksual, justru melahirkan tuntutan agar kealiamahan mereka diakui (Donny Gahral Adian, 2001: 49). Dalam foucault-dian dapat dijelaskan bahwa semakin kuat kekuasaan itu menghegemoni untuk berkuasa, maka dengan sendirinya semakin besar peluang untuk terjadinya resistensi. Sehingga dalam konteks ini resistensi merupakan anak kandung dari kekuasaan. Dengan demikian resistensi yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap kebijakan kampus, seperti penolakan-penolakan untuk mematuhi kebijakan presensi 75% kehadiran di kelas sebagai gambaran beroperasinya mesin kekuasaan kampus<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Baca: birokrasi kampus yang terdiri dari rektor, dekan, ketua jurusan serta para pembantunya.



yang mendapat resistensi dari kelompok (Baca: mahasiswa) yang menjadi dari kekuasaan kampus.

## 2. Resistensi sebagai Reaksi

Resistensi berarti; melawan, menentang, perlawanan. James C. Scott memaknai perlawanan “sebagai usaha untuk menahan atau membalas kekuatan atau efek dari...” (James C. Scott, 2000: 328). Dalam konteks ini, perlawanan mahasiswa merupakan reaksi atas dominasi kelas penguasa. Perlawanan di sini juga dapat kita pahami bukan hanya sebagai sebuah tindakan kolektif, melainkan juga tindakan yang dilakukan oleh individu. Artinya, ada perlawanan mahasiswa yang dilakukan secara terorganisir<sup>7</sup> dan ada juga perlawanan yang dilakukan secara individu. Misalnya, penolakan terhadap pemberlakuan jam malam di kampus yang mengatasnamakan KBMU (Keluarga Besar Mahasiswa UIN), dan pembangkangan yang dilakukan oleh mahasiswa secara individu misalnya, tidak mau memakai sepatu ketika ke kampus.

Dalam penelitian ini, James C. Scott dapat di pahami untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk resistensi mahasiswa di UIN Su-Ka Yogyakarta.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya untuk memahami sebuah fenomena tentang proses, misalnya interaksi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Lexy J. Moleong, 2007: 6). Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data antara lain melalui: observasi langsung (*direct observation*), partisipasi langsung (*direct*

*participation*), wawancara (*interview*), dan analisis dokumen. Teknik analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang diperoleh, mereduksi data dengan membuat abstraksi, koding (mengkategorikan data), rekonstruksi (penyusunan ulang), dan terakhir melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh.

Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa yang aktif dalam organisasi gerakan yang ada di UIN Su-Ka<sup>8</sup>, lebih spesifiknya yaitu organisasi yang aktif menyikapi isu-isu sosial dan normatif mahasiswa; misalnya tentang kenaikan biaya SPP, kenaikan biaya gedung dan keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan, jadi bukan “organisasi yang hanya aktif” untuk mengembangkan “hobby” mahasiswa (seperti UKM). Untuk memfokuskan penelitian ini, maka peneliti akan mengambil rentang dinamika periode resistensi mahasiswa UIN Su-Ka tahun 2006-2010. Guna memperoleh data yang valid, maka subjek dalam penelitian ini difokuskan terhadap para pimpinan organisasi dan anggota yang pernah terlibat dalam pendirian organisasi, termasuk juga anggota biasa yang lainnya dari organisasi tersebut.

## Faktor Objektif dan Subjektif Munculnya Resistensi Mahasiswa

### A. Komersialisasi Pendidikan

*“Pendidikan sekarang semakin jauh dari hakikatnya, yaitu mencerdaskan kehidupan manusia. Pendidikan sekarang lebih berorientasikan pada keuntungan atau bisnis, sehingga peserta didik menjadi korban dari model pendidikan seperti ini. Kondisi ini berawal ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi kampus melalui UU no. 61 tahun 1999, yang membuat kampus*

<sup>7</sup> Terorganisir disini di maknai sebagai perlawanan yang melibatkan wadah-wadah, atau yang dilakukan oleh organisasi.

<sup>8</sup> Organisasi gerakan yang ada di UIN diantaranya: SMI, SEKBER, FMN, PMII, HMI MPO, HMI, DPO, KAMMI, IMM, FORSMAD dan GMNI.

*terpaksa harus mencari biaya sendiri, sehingga lahirlah konsep BLU, dimana mahasiswa yang menghendaki memakai fasilitas kampus berkonsekuensi harus membayarnya”<sup>9</sup>.*

Situasi pendidikan pasca diliberalisasikan membuat pendidikan cenderung berorientasi pada modal, *capital oriented*. Pendidikan ibarat lembaga yang hanya mencetak tenaga-tenaga pekerja dan cenderung tidak memaksimalkan potensi kreativitas mahasiswanya. Kebijakan liberalisasi di sektor pendidikan merupakan konsekuensi dari keikutsertaan negara dalam pelaksanaan paket kebijakan neoliberal yang dipaksakan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sejak tahun 1994. Dalam GATS (*General Agreement on Trade in Services*), yang merupakan salah satu persetujuan di WTO, tingkatan pendidikan yang akan diliberalisasi terdiri dari Primary Education Services; Higher Education Services; Adult Education; Other Educations Services (Darmaningtyas: 2005)<sup>10</sup>. Sehingga, negara kita tentu akan ikut serta menjalankan kebijakan liberalisasi di sektor pendidikan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian di atas. Akibat keikutsertaan Indonesia dalam WTO, Indonesia harus tunduk pada aturan main di dalamnya, termasuk membiarkan pendidikan sebagai salah satu sektor yang harus diliberalkan dalam kesepakatan konvensi WTO dan GATS yang telah diratifikasi pada tahun 2001.

Upaya liberalisasi dunia pendidikan

dapat tercermin dari adanya payung hukum, misalnya UU no. 61 tahun 1999, yang substansinya berdampak pada hilangnya tanggungjawab negara dalam dunia pendidikan. Dari sinilah kemudian terjadi perubahan dalam manajemen kampus, atau di istilahkan dengan konsep *otonomi kampus*. Sebagai uji coba, pemerintah kemudian menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai badan hukum milik Negara, seperti UGM, ITB, UI dll<sup>11</sup>. Begitu juga dengan UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, juga ikut mendorong masuknya pendidikan jatuh ke tangan swasta. Ada beberapa pasal yang mengindikasikan bahwa UU SIKDIKNAS tahun 2003, sangat sarat dengan paham komersialisme, di antaranya pasal 6 ayat 2<sup>12</sup> dan pasal 9<sup>13</sup>.

Hadirnya PP no. 76 tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dalam persyaratan penanaman modal, dan PP no. 77 tahun 2007, yang selanjutnya pada tahun 2010 di ganti dengan perpres no. 36 tahun 2010,<sup>14</sup> tidak lain sebagai turunan dari UU Penanaman Modal Asing (PMA), UU no. 25 tahun 2007 semakin menegaskan praktik komersialisasi pendidikan, di mana pendidikan dinyatakan sebagai sektor yang terbuka terhadap penanaman modal Asing hingga 49 %.

Lembaga pendidikan menjadi tempat untuk menyebarkan dan menanamkan ideologi kapital, yang hanya berujung

<sup>9</sup> Wawancara di lakukan pada tanggal 25 Oktober 2011.

<sup>10</sup> <http://www.mustikoning-jagad.com/en/kemanusiaan/38-kemanusiaan/759-pendidikan-dan-kuasa-modal>, di akses tanggal 17 juli 2011.

<sup>11</sup> Lihat peraturan pemerintah republik Indonesia no. 61 tahun 1999, tentang penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum, bab II tentang sifat dan tujuan, pasal 2.

<sup>12</sup> Ayat ini berbunyi “setiap warga negarabertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”.

<sup>13</sup> Ayat ini berbunyi “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.

<sup>14</sup> Lihat perpres no. 36 tahun 2010 dan lampiran perpres no. 36 tahun 2010.

pada pelanggengan kekuasaan kapital dengan logika untung- ruginya. Seperti yang di katakan oleh Philippe Cabin dalam tulisannya yang berjudul *"Di Balik Panggung Dominasi"*, bahwa sekolah (lembaga pendidikan formal-*pen*) diperalat untuk memperkuat ketimpangan-ketimpangan sosial, dan menjadi alat reproduksi kelas yang dominan<sup>15</sup>.

Pembatalan UU BHP oleh MK karena dinilai inkonstitusional ternyata belum menghentikan praktik komersialisasi pendidikan, karena sekali pun UU BHP yang sangat sarat dengan nilai liberalisasi, swastanisasi dan komersialisasi pendidikan, akan tetapi Hadirnya PP no. 66 tahun 2010 sebagai pengganti dari UU no. 9 tahun 2009 tentang badan layanan umum merupakan paket kebijakan yang melegalkan praktik komersialisasi pendidikan, sehingga meskipun UU BHP di batalkan, biaya pendidikan pun tetap semakin mahal dan tidak terjangkau, begitu juga fasilitas kampus yang disewakan terhadap mahasiswa. Itu semua terjadi akibat dari pelepasan tanggungjawab pemerintah terhadap dunia pendidikan, termasuk dalam soal pendanaannya. Yani, seorang aktivis PMII, mengatakan:

*" walaupun UU BHP sudah dibatalkan oleh MK, tetapi praktik komersialisasi pendidikan tidak akan berhenti, karena pada dasarnya UU BHP merupakan turunan dari aturan sebelumnya yaitu di UU SIK-DIKNAS no 25 tahun 2003."*<sup>16</sup>

## **B. Dampak Komersialisasi Pendidikan terhadap Kampus**

Komersialisasi pendidikan sangat berkaitan erat dengan perkembangan proses dialektika pendidikan di tingkat kampus. Komersialisasi pendidikan,

liberalisasi pendidikan atau apa pun namanya menjadi isu yang selalu hangat diperbincangkan mahasiswa sebagai elemen yang langsung merasakan dampaknya. Biaya pendidikan kampus yang mengalami kenaikan, merupakan akibat langsung dari praktik komersialisasi pendidikan. Pragmatisme pun akhirnya terjadi dalam dunia pendidikan dan hal itulah yang salah satunya menstimulus terbentuknya pola kesadaran mahasiswa. Mahasiswa sebagai kelompok yang diuntungkan harus bertanggung jawab terhadap kondisi sosial masyarakatnya yang telah tereduksi oleh kepentingan dari sistem komersialisasi pendidikan.

Mengenai dampak sistem pendidikan nasional, salah satu mahasiswa komunikasi, Jo, angkatan 2005 menyebutkan:

*" perkembangan situasi pendidikan nasional sangat berpengaruh dampaknya terhadap kampus sebagai institusi pendidikan. Misalnya dengan logika kapitalisme, akibat dari kapitalisasi pendidikan, kampus semakin jauh di jangkau oleh orang miskin, termasuk sekarang yang terjadi di UIN yang juga secara otomatis memakai logika bisnis, bukan logika pendidikan. Dengan logika demikian, dampaknya terhadap mahasiswa sangat luar biasa, misalnya kita lihat sudah sangat jarang sekali kita temukan forum diskusi yang dibentuk mahasiswa, yang terjadi justru mahasiswa sekarang dipaksa cepat lulus dan segera kerja sehingga mahasiswa cenderung tidak peka terhadap persoalan yang ada, baik isu internal kampus maupun isu yang nasional."*<sup>17</sup>

Kerja sama UIN Su-Ka dengan lembaga keuangan, seperti *Islamic Development Bank* (IDB) yang di mulai sejak

<sup>15</sup> Cabinm Philippe, *Sosiologi Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2004), hal.. 238.

<sup>16</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2011.

<sup>17</sup> Wawancara pada tanggal 2 November 2011

penandatanganan antara pemerintah RI dengan Direktur IDB tahun 2003, di gunakan sebagai tindak lanjut dari usaha pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam dunia pendidikan. Ibnu hajar aktivis LPM ARENA mengatakan:

*“masuknya IDB ke kampus UIN bukanlah tanpa imbalan, karena IDB seperti lembaga keuangan yang lainnya tentu mengharapkan imbalan dari kampus bukan hanya dalam bentuk dana. Bahkan, beberapa kebijakan yang ada di kampus tidak terlepas dari adanya campur tangan dari donatur tersebut”*.<sup>18</sup>

Demikian juga konsep Badan Layanan Umum (BLU) yang sudah dijalankan di kampus yang *notabene* sebagai solusi untuk memecahkan biaya operasional kampus, justru menjadi beban tersendiri bagi mahasiswa. Secara historis konsep BLU lewat Peraturan Pemerintah (PP) no. 66 tahun 2010 lahir sebagai pengganti dari PP no. 17 tahun 2010 yang tertuang dalam UU BHP yang sudah dibatalkan oleh MK. Dalam pandangan pemerintah, pendidikan khususnya perguruan tinggi dengan berbadan layanan umum akan lebih produktif, efisiensi dan efektif sebagai salah satu layanan publik dengan mengandalkan penganggaran berbasis kerja.

Yanto supriyatna, aktivis FORSMAD mengatakan:

*“sejak fasilitas kampus seperti ruangan kelas untuk seminar di sewakan, kami mengalami kesulitan untuk mengadakan kegiatan semacam seminar di kampus”*.<sup>19</sup>

Kampus yang menjadi basis dari

perkembangan geliat ilmu pengetahuan, tereduksi hanya menjadi ruang untuk menacari keuntungan bagi yang para investor, kampus dijadikan ajang untuk berbisnis, tidak terkecuali UIN Sunan Kalijaga, sehingga semangat pendidikan untuk *“mencerdaskan anak bangsa”* menjadi hilang. Seperti yang dipaparkan oleh Musahwi.<sup>20</sup>

*“bahwa akibat adanya praktik komersialisasi pendidikan, kampus hanya menjadi tempat untuk mencari keuntungan bagi yang mempunyai modal, sehingga orientasi dari pendidikan itu bergeser dari untuk mengembangkan nilai-nilai kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial menjadi orientasi bisnis, sehingga tidak heran kalau kemudian banyak mahasiswa juga yang bersifat pragmatis dan apatis terhadap realitas di sekelilingnya”*.<sup>21</sup>

Dinamika mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus merupakan salah satu wujud dari proses dialektika dan pembelajaran mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas dan kesadarannya sebagai segolongan yang diuntungkan oleh situasi. Paradigma sosial mahasiswa dengan demikian harus berorientasi memberikan kontribusi terhadap realitas yang ada. Akan tetapi, jika pendidikan lebih mengutamakan logika untung rugi tentu akan menjadikan mahasiswa cenderung berubah menjadi apatis, tidak peka terhadap perkembangan yang ada, dan tergiring berwatak pragmatis di mana mahasiswa hanya selalu mengejar nilai (IPK) dan akademis saja.

Sejalan dengan itu, Ach. Azmir

<sup>18</sup> Di kutip dari SLiLiT ARENA, edisi 15 Juli 2011.

<sup>19</sup> Wawancara tanggal 1 November 2011.

<sup>20</sup> Mahasiswa jurusan sosiologi angkatan 2006 yang juga pernah aktif di PMII.

<sup>21</sup> Wawancara pada tanggal 1 November 2011.



Sahara<sup>22</sup> mahasiswa UIN, jurusan Akidah Filsafat berkata:

*"... akibat terjadinya komersialisasi pendidikan, maka mahasiswa cenderung apatis, tidak mau tahu terhadap persoalan lingkungan sosialnya, bahkan juga terhadap persoalan kampusnya sendiri. Mahasiswa sekarang cenderung pragmatis dalam arti dia mengenyam pendidikan hanya untuk cepat lulus dan cepat kerja, begitu juga sebagai dampak dari kapitalisasi pendidikan mahasiswa menjadi hedonisme, hanya senang mencari hiburan, misalnya nongkrong-nongkrong yang tidak produktif, menjadi cluber, ini semua akibat dari praktik komersialisasi pendidikan yang juga di amini oleh kampus. Sehingga, yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana kita memasokkan nilai-nilai kesadaran peran dan fungsi mahasiswa yang sebenarnya dalam konteks sebagai makhluk sosial..".<sup>23</sup>*

### C. Isu-isu Demokratisasi Kampus dan Hak-hak Normatif Mahasiswa

Kampus merupakan miniatur kecil dari negara. Negara sebagai lembaga mempunyai peraturan dan hukum yang berlaku yang dalam proses pengambilannya melewati mekanisme yang sudah disepakati oleh rakyatnya, misalnya lewat pemilu. Di Indonesia, untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa di jalankan, maka diperlukan lembaga-lembaga negara, misalnya ada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Kehadiran lembaga pemerintahan mahasiswa di kampus mulai dari tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan merupakan sebuah wadah yang diharapkan mampu menjalankan amanah dalam

mewujudkan aspirasi mahasiswa sebagai elemen masyarakat kampus serta juga mampu menghidupkan dinamika di kalangan mahasiswa. Keberadaan lembaga pemerintahan mahasiswa juga merupakan suatu cerminan dari penerapan pola sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahan mahasiswa. Proses pemilihan umum mahasiswa setiap dua tahun satu kali dalam rangka untuk memilih mahasiswa yang akan menduduki kursi lembaga pemerintahan mahasiswa semakin mewarnai adanya proses demokratisasi di kampus. Tentu dengan adanya lembaga-lembaga pemerintahan mahasiswa yang menjadi representatif dari mahasiswa yang lain, diharapkan kedaulatan mahasiswa dapat terwujud, karena esensi demokrasi kampus adalah tidak menghilangkan kedaulatan mahasiswa sebagai *civil socitey* dalam konteks kajian demokrasi.

Ahmad Yani,<sup>24</sup> seorang aktivis PMII menyebutkan;

*"Kampus adalah miniatur negara dan dikampus pulal kita harus belajar ber-demokrasi, kampus harus menjalankan sistem yang demokratis, artinya kampus tidak boleh menutup ruang demokrasi bagi mahasiswa. Kampus harus menjadi ruang publik bagi mahasiswa. Kampus tidak boleh sewenang-wenang tanpa melibatkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat kampus yaitu mahasiswa<sup>25</sup>".*

Mahasiswa sebagai elemen masyarakat kampus, menjadi bagian penting dari proses keberlangsungan demokratisasi dalam internal kampus. Demokratisasi kampus tidak akan berjalan tanpa

<sup>22</sup> Ach. Azmir Zahara sekarang ketua umum SMI, dan juga terlibat dalam pembangunan SMI mosisariat UIN Sunan Kalijaga.

<sup>23</sup> Wawancara pada tanggal 26 Juni 2011, di Mampang, Jakarta Selatan.

<sup>24</sup> Mahasiswa Syari'ah, angkatan 2006.

<sup>25</sup> Wawancara pada Tanggal 4 November 2011.

keterlibatan mahasiswa dalam setiap pengambilan kebijakan kampus. Maka dengan demikian, mahasiswa tentu mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan terpenuhi. Hak normatif mahasiswa antara lain: hak untuk mendapatkan pelayanan dari kampus, ruang kuliah yang nyaman, kamar mandi yang bersih, kurikulum kampus, mengembangkan kreativitas di kampus. Begitu juga secara politik, mahasiswa mempunyai hak mengenai keterlibatannya dalam merumuskan kebijakan, ataupun mengenai demokratisasi kampus.

Dalam SK yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Departemen Agama RI no. 1/253/2007, pada 9 juli 2007 tentang Pedoman Umum Berorganisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam, merupakan titik awal dari usaha negara untuk mempersempit ruang demokrasi bagi mahasiswa dalam internal kampus, sehingga mahasiswa hanya diorientasikan untuk menjadi akademisi yang profesional saja. DSK tesebut secara tidak langsung menjadikan *"mahasiswa hanya menjadi santapan untuk disubordinakan dan DEMA-pun tidak mendapat tempat di wilayah pengambilan kebijakan kampus"*.<sup>26</sup>

Dunia kampus sebagai salah satu institusi pendidikan yang bertanggung jawab terhadap pemahaman wawasan kebangsaan generasi mudanya. Dengan itu, proses belajar-mengajar dalam kampus termasuk mengenai praktik-praktik berdemokrasi menjadi penting. Kedaulatan mahasiswa di kampus sebagai cerminan dari terwujudnya praktik demokrasi di dunia pendidikan (baca; kampus) dan pada saat bersamaan merupakan titik awal pembelajaran untuk hidup bernegara yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi.

Mahasiswa sebagai insan akademik dan sekaligus menjadi salah satu

masyarakat kampus tentu mempunyai hak dan kewajiban yang harus sama-sama dipenuhi. Kewajiban mahasiswa harus dijalankan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan kampus, misalnya: membayar biaya kampus, baik DPP, maupun SPP per semester, membuat suasana kampus menjadi nyaman sebagai tempat untuk proses belajar.

Begitu juga hak-hak mahasiswa yang harus mereka nikmati, baik yang bersifat normatif, misalnya: hak untuk mendapatkan pelayanan yang memadai dari kampus, hak untuk menikmati fasilitas kampus, hak untuk mendapatkan pelayanan yang ramah dari kampus termasuk juga hak untuk mendapatkan transparansi keuangan di kampus; maupun hak yang bersifat politik, misalnya: keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan kampus, kebebasan berorganisasi, ataupun kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya.

#### **D. Mahasiswa: *Agen of Change* dan *of Control***

*Mahasiswa dan perubahan* merupakan dua unsur yang saling erat kaitannya. *Agen of change* yang melekat sebagai identitas mahasiswa merupakan identitas yang dibangun secara historis. Keterlibatan mahasiswa dalam setiap gejolak perubahan merupakan wujud bahwa mahasiswa adalah *agent of change*.

Naopal, seorang aktivis sekber, menjelaskan :

*"Peran dan paradigma mahasiswa adalah bagaimana mahasiswa selalu peka terhadap persoalan-persoalan yang ada, baik itu yang bersifat normatif, artinya isu yang berkaitan dengan mahasiswa di tingkatan maupun terhadap isu-isu situasi ekonomi yang lebih luas. Agent of change yang melekat di mahasiswa akan menjadi mitos*

<sup>26</sup> Dikutip dari hasil liputin LPM ARENA terhadap Abbas-presiden mahasiswa, edisi I/Vol.XXIX/V/2008.

*dan hanya tinggal cacatan yang ada dalam sejarahnya kalau mahasiswa tidak mampu mewujudkan dalam suatu tindakan yang nyata, misalnya bagaimana mahasiswa menyikapi isu, kenaikan SPP, demokratisasi kampus, atau mengenai komersialisasi pendidikan, mahasiswa di tengah situasi sekurang diantang untuk mewujudkan bahwa mahasiswa sebagai agent of change.<sup>27</sup>*

Selain sebagai pendorong lahirnya perubahan, mahasiswa sekaligus juga menjadi *agent of control* terhadap kebijakan atau pun terhadap perkembangan realitas yang terjadi. Karena dengan terbentuknya kesadaran mahasiswa sebagai golongan yang diuntungkan oleh situasi kondisi sosial, maka secara tidak langsung mahasiswa juga dituntut untuk menjadi kontrol terhadap realitas yang ada. Dalam dunia kampus, dengan demikian mahasiswa harus menjadi kontrol terhadap dinamika kampus, misalnya terhadap proses demokratisasi kampus, atau pun terhadap progres perkembangan kampus itu sendiri.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sary, mahasiswa jurusan BPI dan sekaligus aktivis SMI, bahwa:

*"situasi kampus, misalnya kebijakan kenaikan SPP, presensi 75% kehadiran atau pun pemberlakuan jam malam, praktik BLU menjadi isu kami, karena kami merasa bahwa isu-isu seperti di atas adalah tanggung jawab kami sebagai mahasiswa, artinya bagaimana mahasiswa juga aktif menyikapi isu-isu normatifnya, karena kita masih menjadi mahasiswa, maka isu yang harus kita sikapi adalah isu-isu normatif kita."<sup>28</sup>*

Proses kesadaran mahasiswa sangat

dipengaruhi oleh proses dialektika di tingkat kampus, seperti aktif di organisasi, membaca dan juga proses dinamika di luar kampus. Kekritisan mahasiswa sebagai wujud dari kesadaran mahasiswa sebagai *agent of change* dan *agent of Control* terwujud dalam bentuk tindakan riil untuk menyikapi isu-isu yang ada, baik isu yang bersifat normatif maupun isu yang bersifat politis. Kampus sebagai wadah dari pembangunan dinamika keilmuan dan dipadu dengan peran dan tanggungjawab mahasiswa, sering menjadi tempat tumbuh suburnya generasi-generasi yang kritis dan radikal dalam menghadapi realitas yang ada. Ibarat setali tiga uang, kampus bagaikan lahan yang menampung rumput-rumput kering yang sewaktu-waktu cepat terbakar, begitulah keterkaitan antara kehidupan kampus, situasi kampus dengan kesadaran mahasiswa.

## Penutup

*Tunduk tertindas atau bangkit melawan  
Sebab mundur adalah pengkhianatan<sup>29</sup>*

Resistensi merupakan tindakan penolakan terhadap sesuatu yang tidak disetujui atau terhadap sesuatu yang dinilai merugikan. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan dua kerangka teori Michel Foucault tentang lahirnya resistensi dan relasi kekuasaan dengan pengetahuan. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan beroperasi lewat sistem sosial yang ada, termasuk lembaga pengetahuan-pendidikan. Kekuasaan dioperasikan dengan mekanisme pelarangan, pembatasan dan lain-lain. Dalam konteks inilah dapat dijelaskan bahwa perkembangan situasi pendidikan merupakan cerminan dari sistem yang dijalankan oleh pemerintah,

<sup>27</sup> Wawancara pada tanggal 5 November 2011.

<sup>28</sup> Wawancara pada tanggal 29 Oktober 2011.

<sup>29</sup> Slogan atau yel-yel mahasiswa UIN Su-Ka ketika melakukan aksi.

pengetahuan menjadi alat untuk menyebarkan nilai-nilai dari sistem yang sedang dijalankan.

Terjadinya praktik komersialisasi pendidikan mengakibatkan pendidikan semakin mahal dan hanya mendukung pada kepentingan pemodal serta menempatkan kebijakan pendidikan untuk dapat diakses semua masyarakat, baik miskin maupun kaya ke posisi termarginalkan. Dalam konteks ini, dunia pendidikan mengalami problem, lembaga pendidikan menjadi kaki tangan penguasa. Kekuasaan tidak hanya mencakup secara fisik atau material, tapi juga secara ide. Jika mahasiswa melakukan resistensi terhadap penguasa kampus, maka resistensi itu lahir bukan untuk melahirkan keonaran atau mengganggu aktivitas perkuliahan yang berlangsung di kampus, resistensi dilakukan karena mereka merasa aspirasinya tidak didengar, karena ruang demokrasi di kampus bagi mereka dirasa tertutup.

James C. Scott dalam analisisnya mengenai bentuk-bentuk perlawanan atau resistensi petani di Malaysia tepatnya di Desa Shaka. Scott mencontohkan, pembangkangan petani untuk tidak menggarap sawah, baik yang dilakukan oleh individual atau pun yang terorganisasikan. Dalam perspektif di atas dapat ditemukan bentuk resistensi yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya aksi demonstrasi, aksi mogok yang dilakukan oleh buruh yang menuntut agar kesejahteraannya terjamin.

Oleh karena itu, berdasarkan temuan-temuan peneliti di lapangan mengenai penyebab lahirnya resistensi di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, resistensi bersumber dari dua faktor: objektif dan subjektif. Faktor objektif terkait dengan kondisi pendidikan secara nasional dan dampaknya terhadap praktik pendidikan di dunia kampus.

Praktik komersialisasi pendidikan yang membuat pendidikan semakin mahal, dan juga berorientasi pragmatisme ekonomis semata adalah fakta yang juga berpengaruh terhadap dinamika di kampus UIN Sunan Kalijaga. Kebijakan kampus, seperti, presensi 75%, pemberlakuan jam malam, adanya pelayanan kampus yang kurang bersahabat bagi mahasiswa, pengambilan kebijakan yang tidak melibatkan mahasiswa, praktek BLU (badan layanan umum) serta masih adanya beberapa fasilitas kampus yang tidak berfungsi, termasuk kurang transparannya masalah keuangan kampus, biaya pendidikan yang mengalami kenaikan, merupakan sekian isu yang menjadi faktor objektif dilapangan yang mendorong lahirnya resistensi mahasiswa di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di samping itu, dampak dari praktik pendidikan yang mengamini masuknya sistem kapitalisasi adalah semakin membuat mahasiswa hanya berorientasi akademis “profesional”. Sementara pembentukan nilai-nilai kesadaran kritis mahasiswa terhadap realitas di lapangan semakin tidak menemukan ruangnya dalam dinamika pembelajaran. Kampus bukan lagi sebagai ruang publik atau sebagai ajang untuk proses pembelajaran berdemokrasi bagi mahasiswa. Secara objektif mahasiswa mendapati realitas yang tidak sesuai dengan pandangan mahasiswa. Mereka melihat realitas pendidikan sekarang lebih menguntungkan segelintir orang, baik di tingkat nasional maupun di tingkat kampus, dan mereka menilai bahwa pendidikan tidak lagi berorientasi untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran sebagai manusia, akan tetapi lebih berorientasikan kepada pragmatisme yang bernilai ekonomis, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap pola pembangunan paradigma mahasiswa sebagai *agent of change* dan



*agent of control*.

Sementara, secara subjektif mahasiswa menyadari akan posisi sosial atau paradigma mahasiswa sebagai kelompok kelas menengah yang diuntungkan oleh situasi. Kesadaran mahasiswa akan peran dan posisi sosial di tengah-tengah masyarakat, yaitu sebagai kelas atau sekelompok yang diuntungkan oleh situasi sehingga harus peka terhadap perkembangan realitas yang ada. Disamping itu, bahwa mahasiswa sebagai *agent of change* dan *agent of control* semakin menegaskan dan mendorong mahasiswa secara subjektif untuk menjadi agen perubahan dalam situasi yang ada. Realitas demikianlah yang menjadi faktor subjektif lahirnya resistensi mahasiswa di kampus UIN Su-Ka.

Disini dapat dikatakan, bahwa resistensi muncul dari relasi atau keterpaduan antara kesadaran mahasiswa terhadap kondisi sosial masyarakatnya termasuk realitas dalam dunia kampus (*sebagai agent*

*of change* dan *agent of control*), dengan fakta objektif yang dinilai merugikan terhadap mahasiswa termasuk orientasi pendidikan bahkan *capabilitas* tenaga pengajar (baca; dosen).

*Kedua*, adalah mengenai bentuk-bentuk resistensi mahasiswa di UIN Su-Ka Yogyakarta. Berdasarkan temuan data-data di lapangan dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu secara organisasional dan individual. Secara terorganisir resistensi mahasiswa berbentuk aksi demonstrasi longmarch, pembuatan selebaran di kampus dan berbentuk pamflet yang ditempel di mading-mading kampus, ada juga yang berbentuk aksi mimbar bebas hingga pada aksi pendudukan gedung rektorat. Sementara yang berbentuk individual lebih mengacu pada tulisan mahasiswa yang kemudian dikirim ke media, misalnya media surat kabar harian atau pun ke lembaga pers mahasiswa kampus yang berisi tentang kritik mahasiswa terhadap situasi kampus.

## Bacaan

### Buku

Cabinm, Philippe. 2004. *Sosiologi Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. (Bantul: Kreasi Wacana).

### Artikel

Slilit ARENA (*edisi* 15 Juli, 2011). 2011. (Yogyakarta: UIN Su-Ka).

ARENA. edisi I/Vol.XXIX/V/2008.

### Internet

<http://www.mustikoning-jagad.com/en/kemanusiaan/38-kemanusiaan/759-pendidikan-dan-kuasa-modal>, diakses tanggal 17 juli 2011.

### Undang-undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum ( pasal 2, Bab II).

Perpres No. 36 tahun 2010 dan lampiran perpres no. 36/2010.